

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Era reformasi mendorong munculnya otonomi daerah di Indonesia yang dimulai setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014) dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 (kemudian diganti menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa “Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Tujuan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Otonomi daerah juga dapat memacu kreativitas dari pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi sumber-sumber pendapatan dan mengalokasikannya kepada sektor yang dianggap dapat meningkatkan pembangunan daerah. Sementara itu pemerintah pusat diharapkan dapat lebih berfokus kepada perumusan peraturan dan kebijakan makro yang lebih umum dengan daerah cakupan yang luas.

Munculnya otonomi daerah menimbulkan adanya perubahan dalam berbagai aspek, diantaranya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah pengalihan tanggung jawab, kewenangan dan sumber-sumber daya dari pusat ke daerah (V. Wiratna Sujarweni, 2015:233). Perubahan sistem ini tentunya berpengaruh terhadap peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak lagi menjadi pemegang kewenangan penuh atas pengelolaan daerah. Dengan adanya sistem desentralisasi, pemerintah daerah lebih fleksibel dalam mengatur strategi pembangunan melalui proses pendekatan dengan masyarakatnya sehingga aspirasi dari masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. Adanya penyelenggaraan desentralisasi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pemerintah pusat tidak sepenuhnya lepas tangan dari pengelolaan keuangan daerah. Pengendalian pemerintah pusat sangat diperlukan untuk dapat mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan agar menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:107) kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja (Mardiasmo

dalam V. Wiratna Sujarweni, 2015:107). Salah satu alat ukur penilaian kinerja adalah berdasarkan aspek keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat (V. Wiratna Sujarweni, 2015:236).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya terkhusus dalam keuangannya dapat dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tercermin dalam pembiayaan pelaksanaan tugas pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APBD ini kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas kepada publik. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dana yang diperoleh dan pengalokasian dana tersebut untuk menilai capaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusyufi (2014:L-5) kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio, diantaranya rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan *debt service coverage ratio*.

Untuk mencapai kinerja keuangan yang baik, tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk mengukur *wealth*

(kemakmuran) daerah tersebut. Menurut Iim Nur Aminah, Nunuy Nur Afiah dan Arie Pratama (2019:150) *wealth* (kemakmuran) merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari seberapa baik pemerintah daerah dalam mencukupi kebutuhannya dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada prinsipnya, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka akan meningkatkan dana yang tersedia untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah tersebut dalam menggali potensi-potensi sumber keuangan yang ada di daerahnya dan mampu untuk merealisasikan serta mengalokasikan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhannya sendiri dengan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

*Wealth* (kemakmuran) setiap daerah berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki setiap daerah. Daerah yang memiliki kemajuan di bidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar untuk mencukupi kebutuhannya, begitu pula sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan, di satu sisi

ada daerah yang dapat memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi untuk mencukupi kebutuhannya dan di sisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tidak cukup untuk digunakan dalam membiayai kebutuhan. Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah berasal dari empat sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu membiayai kebutuhan dana dalam melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada pendapatan asli daerah yang dimilikinya. Berikut merupakan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2014-2018.



Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

**Gambar 1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018**

Gambar 1.1 menjelaskan mengenai Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2014-2018, dimana dapat dilihat bahwa

setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. Hal ini menjadi fenomena menarik untuk diteliti, dikarenakan *wealth* (kemakmuran) daerah yang ditunjukkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

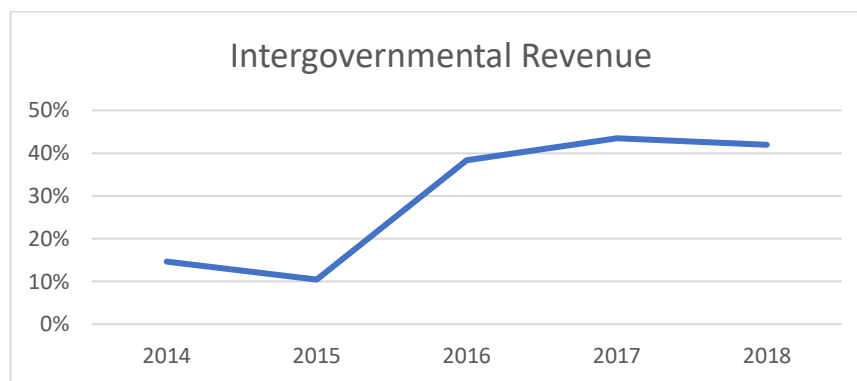
Penerimaan pemerintah daerah, tidak hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah tetapi juga berasal dari *Intergovernmental revenue* atau yang lebih dikenal dengan Dana Perimbangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan (*Intergovernmental Revenue*) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Perimbangan (*Intergovernmental Revenue*) terdiri dari Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

*Intergovernmental Revenue* diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan fiskal, pemerintah pusat memberikan *intergovernmental revenue* (dana perimbangan) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat berharap semakin besar *intergovernmental revenue* yang diberikan kepada pemerintah daerah maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya.

*Intergovernmental Revenue* mempunyai peranan penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Apabila pemerintah hanya mengandalkan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pembangunan untuk publik tidak akan terpenuhi, apalagi jika daerah tersebut hanya memiliki sedikit sumber daya yang

dihasilkan maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan juga sedikit. Oleh karena itu, diperlukan *Intergovernmental Revenue* untuk menambah pendapatan daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Dibawah ini disajikan Gambar 1.2 mengenai *Intergovernmental Revenue* Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018.



Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

**Gambar 1.2**  
***Intergovernmental Revenue* di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018**

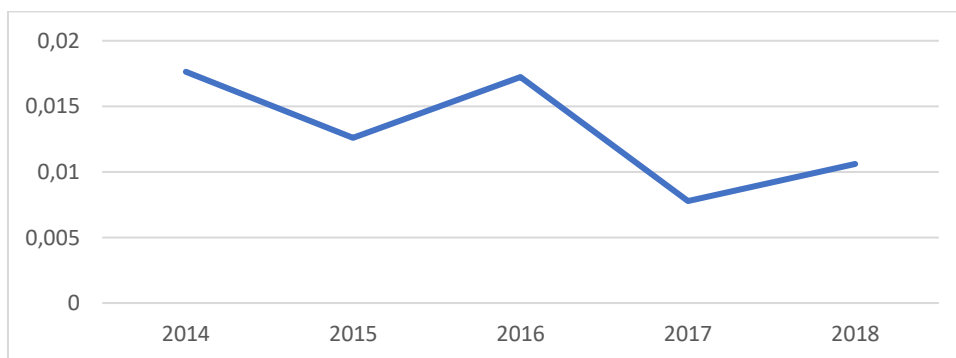
Gambar 1.2 menunjukkan proporsi *Intergovernmental Revenue* terhadap Pendapatan Daerah di provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2018, dimana dapat dilihat bahwa rata-rata tersebut menunjukkan nilai fluktuasi yang bermacam-macam. Pada tahun 2014 menuju 2015 mengalami penurunan *intergovernmental revenue* sedangkan tahun 2016 mengalami kenaikan signifikan. Tahun 2017 mengalami kenaikan sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan. Kenaikan dan penurunan tersebut dapat menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan daerah sehingga menyebabkan *intergovernmental revenue* meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya *intergovernmental*

*revenue* dapat mendorong pemerintah pusat untuk memperketat pengawasannya terhadap pemerintah daerah sehingga terpacu dalam meningkatkan kinerja.

Selain Pendapatan Asli Daerah dan *Intergovernmental Revenue*, sumber pembiayaan daerah yang lain adalah berasal dari pinjaman daerah. Pemerintah Daerah yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya melakukan pengajuan utang kepada pihak eksternal dimana utang tersebut akan menjadi kewajiban pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2015:115) Kewajiban didefinisikan sebagai utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Keputusan pemerintah daerah untuk melakukan utang daerah berpengaruh terhadap *leverage*. Menurut Halkadri Fitra (2019:134) *leverage* adalah proporsi yang menggambarkan hubungan antara hutang pemerintah daerah terhadap ekuitas maupun aset yang dimiliki. Artinya, seberapa besar utang yang ditanggung oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan asetnya atau ekuitas yang dimilikinya.

Setiap utang yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan menimbulkan beban masing-masing. Semakin besar pinjaman, semakin besar pula beban bunga yang harus dibayarkan. Upaya penanganan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Berikut ini adalah nilai *leverage* provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018.





Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

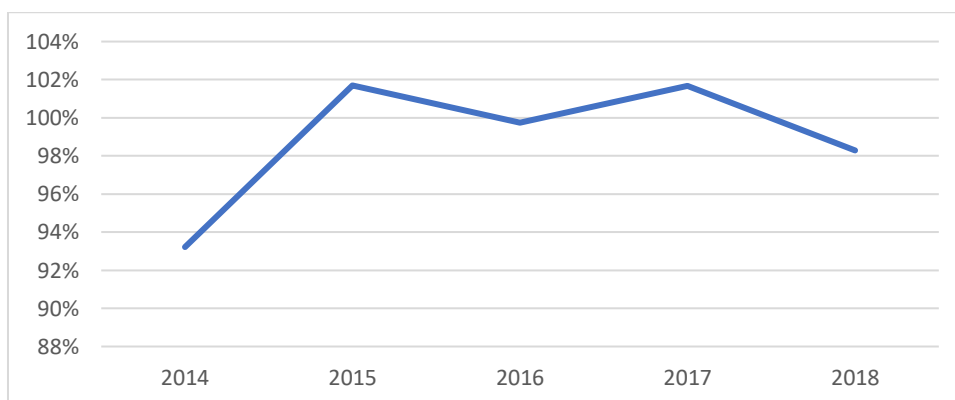
**Gambar 1.3**  
**Nilai *leverage* Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018**

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat nilai *leverage* provinsi Jawa Barat berfluktuasi dari tahun 2014-2018. Kenaikan atau penurunan nilai *leverage* ini menjadi penting bagi pemerintah daerah karena semakin tinggi nilai *leverage* menunjukkan semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pembiayaan utang yang berarti pula semakin besar risiko keuangan daerah (Mahmudi, 2016:122).

*Leverage* dianggap mampu mempengaruhi kinerja keuangan, karena semakin besar *leverage* maka semakin besar ketergantungan entitas pada pihak luar karena semakin besar utang yang dimiliki entitas tersebut maka semakin rendah kinerja keuangan entitas tersebut. *Leverage* berhubungan dengan penggunaan aktiva atau dana dimana penggunaan aktiva tersebut pemerintah daerah harus menutup biaya tetap atau beban tetap (Ernawati dan Jaeni, 2018).

Kinerja keuangan dapat diukur menggunakan rasio efisiensi. Rasio ini menggambarkan seberapa besar pengeluaran daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Fenomena yang ada dikutip Sabtu, 22 Februari 2020 dari Tempo.co, tentang artikel yang berjudul “Kemenkeu Tuding Pemda Boros”.

Kementerian Keuangan menyatakan pemerintah daerah tidak mengelola keuangannya dengan efektif dan efisien. Padahal kucuran dana untuk daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Tegus Widodo mengatakan transfer ke daerah tahun 2017 mencapai Rp. 766 triliun. Saat peluncuran desentralisasi fiskal nilainya hanya Rp. 81 triliun. “Angkanya naik lebih dari 10 kali lipat,” ucap beliau. Berikut ini rasio efisiensi dengan membandingkan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018.



Sumber: [ww.djpk.kemenkeu.go.id](http://ww.djpk.kemenkeu.go.id)

#### **Gambar 1.4** **Nilai Rasio Efisiensi pada pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018**

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat dilihat rasio efisiensi pada pemerintah Provinsi Jawa Barat berfluktuasi dari tahun 2014-2018, dimana pada tahun 2014 rasio efisiensi pemerintah daerah sebesar 93,2%. Pada tahun 2015 rasio efisiensi pemerintah daerah sebesar 101,7%. Pada tahun 2016 rasio efisiensi pemerintah daerah sebesar 99,7%. Pada tahun 2017 rasio efisiensi pemerintah daerah sebesar 101,7% dan pada tahun 2018 rasio efisiensi pemerintah daerah sebesar 98,3%. Pada tahun 2014, 2016, dan 2018 menunjukkan pemerintah provinsi Jawa Barat telah

efisien karena nilai rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2017 menunjukkan nilai lebih dari 100% artinya pemerintah provinsi Jawa Barta tidak efisien dalam mengelola anggarannya. Kenaikan dan penurunan rasio efisiensi ini menjadi penting bagi pemerintah daerah karena semakin rendah nilai rasio efisiensi, maka semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah tersebut.

Dari fenomena tersebut, terdapat adanya kecurigaan dari kemenkeu mengenai realisasi pengeluaran daerah yang berasal dari penerimaan daerah, yaitu dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (*Intergovernmental Revenue*) dan pembiayaan dari pihak eksternal masih dinilai kurang efisien. Artinya, kemenkeu menilai bahwa Pemerintah Daerah Jawa Barat masih belum mampu untuk memanfaatkan dana yang tersedia untuk digunakan dalam belanja daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa pemerintah daerah harus berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar tercipta kemakmuran (*wealth*) daerah. *Intergovernmental Revenue* yang diberikan oleh pemerintah pusat harus dapat dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan kinerja keuangan. Selain itu, perlu adanya perhitungan nilai *leverage* untuk mengetahui struktur pembiayaan pemerintah daerah.

Sejalan dengan uraian di atas, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merujuk kepada penelitian sebelumnya antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Novia dan Kartim (2019) telah meneliti tentang Pengaruh *Size*, *Wealth*, *Leverage*, dan *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua menyimpulkan bahwa *Size*, *leverage*, dan *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan *Wealth* berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Size*, *Wealth*, *Leverage* dan *Intergovernmental Revenue* secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto dan Dian Fatmawati (2019) mengenai Determinan Kinerja Pemerintah Daerah : Ukuran Pemda, *Leverage*, Temuan Audit Dan Tindak Lanjutnya menyimpulkan bahwa ukuran daerah, *leverage*, temuan audit, dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemda. Ukuran pemda, temuan audit, tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda di Pulau Jawa tahun 2014. *Leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Risma Diri Artha (2015) mengenai Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Tatas Ridho Nugroho dan Novi Eko Prasetyo (2018) mengenai Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur menyimpulkan bahwa Ukuran (*size*) pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah. *Intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dan Jaeni (2018) mengenai Faktor Penentu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah menyimpulkan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemakmuran (*Wealth*) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran Legislatif berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Intergovernmental Revenue* dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yevi Alvini (2018) mengenai Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Periode 2011- 2016 menyimpulkan bahwa Hasil pengujian menunjukkan ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Sedangkan tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Gita Maiyora (2015) mengenai Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera menyimpulkan bahwa *Size* (ukuran)

pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti *size* merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja keuangan. *Wealth* (kemakmuran), Ukuran Legislatif, *Leverage* pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. *Intergovernmental Revenue* pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Puspa Sari (2016) mengenai Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, *Leverage*, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Pulau Sumatra menyimpulkan bahwa Ukuran pemerintah daerah PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Leverage* dan Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Asmaul Azis (2016) mengenai Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Timur menyimpulkan bahwa terdapatnya pengaruh ukuran (*size*) pemerintah daerah, *Intergovernmental revenue* dan belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Iim Nur Aminah, Nunuy Nur Afiah, dan Arie Pratama (2019) mengenai Pengaruh *Size*, *Wealth*, *Intergovernmental Revenue* Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Barat menyimpulkan bahwa *Size*, *Wealth*, *Intergovernmental Revenue* dan *Belanja Modal* berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Size*, *Wealth*,

*Intergovernmental Revenue* dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Rusmita (2019) telah meneliti tentang *Effect of Regional Government Characteristics of Financial Performance In West Kalimantan* menyimpulkan bahwa *regional spending and dependency of district / city local governments in West Kalimantan on central government have an influence on the financial performance of district / city governments in West Kalimantan, while government size, prosperity and leverage have no influence on government financial performance district / city areas in West Kalimantan.*

Penelitian yang dilakukan oleh Ietje Nazaruddin dan Yuni Yanti Abi Sita (2019) mengenai *The Effects of Government Characteristics, Complexity, Audit Findings, and Audit Opinions on the Level of Provincial Government Financial Statement Disclosures in Indonesia* menyimpulkan bahwa *there are only 4 positively significant variables on the dependent variable, which are regional wealth, intergovernmental revenue, leverage, and audit opinions; while the other 3 independent variables do not have an effect on the dependent variable, which are the government age, functional differentiation, and audit findings.*

Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Setyaningrum dan Dwi Martani (2017) mengenai *Determinants of Local Government Performance in Indonesia* menyimpulkan bahwa *follow-up of audit recommendations, level of dependency on central government, proportion of non-routine expenditure, number of legislature members, number of voters and local government wealth have positive effects on local government performance.*

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anwar (2019) mengenai *Financial Performance of Local Governments in Indonesia* menyimpulkan bahwa *Local revenue, Audit Opinion, Legislature Size and Intergovernmental Revenue have a significant relationship with the financial performance of local governments.*

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Indra Prayitno dan Nova Novita (2013) mengenai *Local Government's Revenue, Audit Opinion Of BPK And Financial Performance Of Local Government: Indonesia Evidence* menyimpulkan bahwa *local government revenue (PAD) and audit opinion partially have a significant effect on the financial performance, while the local government retributions, resources and proceeds of wealth management owned by the regions (BUMD), other income legal local revenues have no significant effect on the financial performance of local governments.*

Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Rizki Utama, Einde Evana, dan Rindu Rika Gamayuni (2019) mengenai *The effect of local government Characteristics on Performance of Local Government Administration* menyimpulkan bahwa *The variable that had positive significant effect was legislature size (X4). While the regional wealth level (X1) had insignificant effect to the performance of the local government administration, but the coefficient score was positive. The dependency to the central government (X2) had insignificant effect to the performance of the local government administration and the coefficient score was negative. The capital expenditure contribution (X3) had significant effect to the performnce of the local government administration but the coefficient score was negative.*

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyu Agustiningih, Sri Murni, dan



Gustita Arnawati Putri (2017) mengenai *Audit Findings, Local Government Characteristics, and Local Government Financial Statement Disclosure* menyimpulkan bahwa *audit findings moderates the effect of local government characteristics measured through local government wealth on the level of disclosure in local government financial report. However, audit findings do not moderate the positive effect of local government size on the level of disclosure in local government financial report.*

Penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih, Indira Januarti<sup>2</sup>, Ceacilia Srimindarti dan Rachmawati Meita Oktaviani (2019) mengenai *Does the characteristics of regional government and complexity affect on the disclosure regional financial statements?* Menyimpulkan bahwa *regional wealth has a significant positive effect on the level of disclosure of provincial RGFS in Indonesia, the level of dependency does not affect the level of disclosure of provincial RGFS in Indonesia, government size has a significant positive effect on the level of disclosure of provincial RGFS in Indonesia, the number of R(A)WUs has a significant positive effect on the level of disclosure of provincial RGFS in Indonesia, and the legislative size has effects on the level of disclosure of provincial RGFS in Indonesia.*

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Indayani, Lindrianasari, Rindu Rika Gamayuni (2018) mengenai *The Effect Of Village Characteristics Toward Village Finance Efficiency In Lampung, Indonesia* menyimpulkan bahwa *The size of the village has a significant negative effect on the financial efficiency of villages in Lampung Province. The level of wealth positively affects the efficiency of village*

*finances in Lampung Province. The level of dependence has a significant positive effect on the efficiency of village finances in Lampung Province.*

Penelitian yang dilakukan oleh Arik Susbiyani, Bambang Subroto, Sutrisno, dan Bambang Purnomosidhi (2014) mengenai *The Compliance with Mandatory Disclosure of Financial Statement: A Study from Local Government in Indonesia* menyimpulkan bahwa *variable size of district and city, type of local government, and wealth consistently affect on the level of compliance with mandatory disclosure. Other variable, namely the level of local dependence on central government may prove inconsistent effect though.*

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

Peneliti, Tahun, Judul dan Tempat	Variabel Yang Diteliti		Hasil Penelitian	Sumber
	Persamaan	Perbedaan		
Rina Novia dan Kartim (2019), Pengaruh <i>Size, Wealth, Leverage, Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada Pemerintahan Provinsi Papua)</i>	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Wealth</i></li> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• <i>Intergovernmental Revenue</i></li> <li>• <i>Kinerja Keuangan</i></li> </ul>	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Size</i></li> </ul>	<i>Size, leverage, dan Intergovernmental Revenue</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Wealth</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</i>	<i>Accounting Journal</i> Universitas Yapis Papua : Volume 1 Nomor 1 Desember 2019 ISSN 2686-2069 (Online)
Kiswanto dan Dian Fatmawati (2019), Determinan Kinerja Pemerintah Daerah : Ukuran Pemda, <i>Leverage, Temuan Audit Dan Tindak Lanjutnya (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa)</i>	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kinerja Pemerintah Daerah</i></li> <li>• <i>Leverage</i></li> </ul>	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Size</i></li> <li>• <i>Temuan audit</i></li> <li>• <i>Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan</i></li> </ul>	<i>Size</i> berpengaruh positif terhadap kinerja pemda. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Temuan audit berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kinerja pemda.	Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 3, (1), 2019, 44-54 e2579-9991, p2579-9975

Risma Diri Artha (2015), Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB)	Variabel: • Kinerja Keuangan Pemerintah • <i>Wealth</i> • <i>Leverage</i>	Variabel: • Temuan Audit BPK • Belanja modal • Ukuran pemerintah	<i>Wealth</i> , belanja modal, <i>leverage</i> dan temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan arah hubungan yang positif.	Jurnal InFestasi Vol. 11, No.2, Desember 2015 Hal. 214 – 229 P-ISSN: 0216-9517 E-ISSN: 2460-8505
Tatas Ridho Nugroho dan Novi Eko Prasetyo (2018), Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur	Variabel: • <i>Intergovernmental Revenue</i> • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel: • <i>Size</i> • Belanja Daerah	<i>Size</i> pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. <i>Intergovernmental revenue</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan Vol 7 No 1 April 2018 Hlmn. 27-34 ISSN 2302-6251
Ernawati dan Jaeni (2018), Faktor Penentu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2015-2017)	Variabel: • <i>Wealth</i> • <i>Intergovernmental Revenue</i> • <i>Leverage</i> • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel: • <i>Size</i> Pemerintah Daerah • Ukuran Legislatif	<i>Size</i> , <i>wealth</i> , <i>leverage</i> , dan <i>Intergovernmental Revenue</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran Legislatif berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Mei 2018, Hal: 73 - 81 Vol. 7, No. 1 ISSN : 2656-4955
Yevi Alvini (2018), Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Periode 2011- 2016)	Variabel: • <i>Wealth</i> • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel: • <i>Size</i> • Belanja Modal • Tingkat Ketergantungan Daerah	<i>Size</i> , <i>wealth</i> , dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	JOM FEB, Riau University Volume 1, Edisi 1 (Januari – Juni 2018) E-ISSN: 2355-6854

Gita Maiyora (2015), Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera)	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Wealth</i></li> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• <i>Intergovernmental Revenue</i></li> <li>• Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</li> </ul>	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Size</i></li> <li>• Ukuran Legislatif</li> </ul>	<i>Size</i> dan <i>Intergovernmental Revenue</i> pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. <i>Wealth</i> , Ukuran legislatif, dan <i>Leverage</i> pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan..	Jom FEKON Riau university Vol. 2 No. 2 Oktober 2015 ISSN: 2355-6854
Indah Puspa Sari (2016), Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, <i>Leverage</i> , Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra)	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• <i>Intergovernmental Revenue</i></li> <li>• Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</li> </ul>	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Size</i></li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Ukuran legislatif</li> </ul>	<i>Size</i> , Pendapatan Asli Daerah, dan <i>Intergovernmental Revenue</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah <i>Leverage</i> dan Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	JOM Fekon Riau University Vol.3 No.1 (Februari) 2016 ISSN: 2355-6854
Asmaul Azis (2016), Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Pada Kabupaten / Kota Di Jawa Timur)	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Intergovernmental revenue</i></li> <li>• Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</li> </ul>	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Size</i></li> <li>• Belanja daerah</li> </ul>	<i>Size</i> , belanja daerah, dan <i>Intergovernmental revenue</i> berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah	E-Journal Universitas Islam Majapahit Mojokerto EKSIS Vol XI No 1, 2016 ISSN: 1907-7513 Hal 87-101
Iim Nur Aminah, Nunuy Nur Afiah, Dan Arie Pratama (2019), Pengaruh <i>Size</i> , <i>Wealth</i> , <i>Intergovernmental Revenue</i> Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Pemerintah Daerah Yang Ada Di Wilayah Jawa Barat)	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Wealth</i></li> <li>• <i>Intergovernmental Revenue</i></li> <li>• Kinerja Pemerintah Daerah</li> </ul>	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Size</i></li> <li>• Belanja Modal</li> </ul>	<i>Size</i> , <i>Wealth</i> , <i>Intergovernmental Revenue</i> dan <i>Belanja Modal</i> berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. <i>Size</i> , <i>Wealth</i> , <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.	<b>SIKAP</b> , Vol 3 (No. 2), 2019, hal 147-165 p-ISSN: 2541-1691 e-ISSN: 2599-1876
Sari Rusmita (2019), <i>Effect of Regional Government Characteristics of Financial</i>	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• <i>Financial performance</i></li> </ul>	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Government Size</i></li> <li>• <i>Regional Expenditures</i></li> </ul>	<i>regional spending and dependency of district/ city local governments in West Kalimantan on central government</i>	<i>International Research in Economics and Finance</i> ; Vol. 3, No. 2;

<p><i>Performance In West Kalimantan.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dependence on the Central Government</li> <li>• Regional Government Independence</li> </ul>	<p>have an influence on the financial performance of district / city governments in West Kalimantan, while government size, prosperity and leverage have no influence on government financial performance district / city areas in West Kalimantan.</p>	<p>December, 2019 ISSN 2529-8038 E-ISSN 2591-734X</p>	
<p>Ietje Nazaruddin dan Yuni Yanti Abi Sita (2019), <i>The Effects of Government Characteristics, Complexity, Audit Findings, and Audit Opinions on the Level of Provincial Government Financial Statement Disclosures in Indonesia</i></p>	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wealth</li> <li>• Intergovernmental Revenue</li> <li>• Leverage</li> </ul>	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Opinion</li> <li>• Government age</li> <li>• Function Differentiation</li> <li>• Audit Findings</li> <li>• Financial Statement Disclosures</li> </ul>	<p>there are only 4 positively significant variables on the dependent variable, which are regional wealth, intergovernmental revenue, leverage, and audit opinions; while the other 3 independent variables do not have an effect on the dependent variable, which are the government age, functional differentiation, and audit findings.</p>	<p><i>Advances in Economics, Business and Management Research</i>, volume 102 ISSN: 2352-5428</p>
<p>Dyah Setyaningrum dan Dwi Martani (2017), <i>Determinants of Local Government Performance in Indonesia</i></p>	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wealth</li> <li>• Financial Performance</li> </ul>	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit recommendations</li> <li>• Level of dependency</li> <li>• Non-routine expenditure</li> <li>• Legislature members</li> <li>• Number of voters</li> </ul>	<p>follow-up of audit recommendations, level of dependency on central government, proportion of non-routine expenditure, number of legislature members, number of voters and local government wealth have positive effects on local government performance.</p>	<p><i>Advances in Economics, Business and Management Research (AEMBR)</i>, Vol. 55</p>
<p>Khoirul Anwar (2019), <i>Financial Performance of Local Governments in Indonesia</i></p>	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intergovernmental Revenue</li> <li>• Financial Performance</li> </ul>	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Local Revenue</li> <li>• Audit Opinion</li> <li>• Legislative Size</li> </ul>	<p>Local Revenue, Audit Opinion, and legislative size have a significant relationship with the financial performance of local governments. Intergovernmental Revenue size have no significant relationship with the financial performance of local governments</p>	<p><i>European Journal of Business and Management Research</i>. Vol. 4 No. 6, December 2019. ISSN: 2507-1076</p>

Aditya Indra Prayitno dan Nova Novita (2013), <i>Local Government's Revenue, Audit Opinion Of BPK And Financial Performance Of Local Government: Indonesia Evidence</i>	Variabel: • <i>Financial Performances</i>	Variabel: • <i>Local Governments Revenue</i> • <i>Audit opinion of BPK</i>	<i>Local government revenue (PAD) and audit opinion partially have a significant effect on the financial performance, while the local government retributions, resources and proceeds of wealth management owned by the regions (BUMD), other income legal local revenues have no significant effect on the financial performance of local governments..</i>	<i>Proceedings of The 3rd Annual International Conference Syiah Kuala University (AIC Unsyiah) October 2-4, 2013, Banda Aceh, Indonesia p-ISSN: 2089-208X</i>
Fikri Rizki Utama, Einde Evana, dan Rindu Rika Gamayuni (2019), <i>The effect of local government Characteristics on Performance of Local Government Administration</i>	Variabel: • <i>Wealth</i>	Variabel: • <i>Legislature size</i> • <i>Dependency to the central government</i> • <i>Capital Expenditure</i> • <i>Performance of Local Government Administration</i>	<i>The variable that had positive significant effect was legislature size. While the regional wealth level had insignificant effect to the performance of the local government administration, but the coefficient score was positive. The dependency to the central government had insignificant effect to the performance of the local government administration and the coefficient score was negative. The capital expenditure contribution had significant effect to the performance of the local government administration but the coefficient score was negative.</i>	<i>International Research Journal of Business Studies Vol 12 No. 2, 197-208 ISSN: 2089-6271   e-ISSN: 2338-4565</i>
Sri Wahyu Agustiningsih, Sri Murni, dan Gustita Arnawati Putri (2017), <i>Audit Findings, Local Government Characteristics, and Local Government Financial Statement Disclosure</i>	Variabel: • <i>Wealth</i>	Variabel: • <i>Audit findings</i> • <i>Size</i> • <i>Local Government Financial Disclosure</i>	<i>Audit findings moderates the effect of local government characteristics measured through local government wealth on the level of disclosure in local government financial report. However, audit findings do not moderate the positive effect of local government size on the level of disclosure in</i>	<i>Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 6, Issue 3, 179-187 ISSN: 2304-1013 (Online); 2304-1269 (CDROM); 2414-6722 (Print)</i>

<p>Pancawati Hardiningsih, Indira Januari, Ceacilia Srimindarti dan Rachmawati Meita Oktaviani (2019), <i>Does the characteristics of regional government and complexity affect on the disclosure regional financial statements?</i></p>	<p>Variabel: • <i>Wealth</i></p>	<p>Variabel: • <i>Size</i> • <i>Level of dependency</i> • <i>Legislative Size</i> • <i>Discloure of financial statements</i></p>	<p><i>local government financial report</i> <i>Wealth has a significant positive effect on the level of disclosure of provincial RGFS in Indonesia, the level of dependency does not affect the level of disclosure of provincial RGFS in Indonesia, government size has a significant positive effect on the level of disclosure of provincial RGFS in Indonesia, the number of R(A)WUs has a significant positive effect on the level of disclosure of provincial RGFS in Indonesia, and the legislative size has effects on the level of disclosure of provincial RGFS in Indonesia.</i></p>	<p>Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol. 23 No. 2, December 2019, 106-116 ISSN 1410-2420 (Print), 2528-6528 (Online)</p>
<p>Fitri Indayani, Lindrianasari, Rindu Rika Gamayuni (2018), <i>The Effect Of Village Characteristics Toward Village Finance Efficiency In Lampung, Indonesia</i></p>	<p>Variabel: • <i>Wealth</i></p>	<p>Variabel: • <i>Size</i> • <i>Level of dependency</i> • <i>Finance Efficiency</i></p>	<p><i>The size of the village has a significant negative effect on the financial efficiency of villages in Lampung Province. The level of wealth positively affects the efficiency of village finances in Lampung Province. The level of dependence has a significant positive effect on the efficiency of village finances in Lampung Province.</i></p>	<p><i>International Journal Of Scientific &amp; Technology Research</i> VOLUME 7, ISSUE 4, APR 2018 ISSN 2277-8616</p>
<p>Arik Susbiyani, Bambang Subroto, Sutrisno, dan Bambang Purnomosidhi (2014), <i>The Compliance with Mandatory Disclosure of Financial Statement: A Study from Local</i></p>	<p>Variabel: • <i>Wealth</i></p>	<p>Variabel: • <i>Size</i> • <i>Type Of Local Government</i> • <i>Compliance with mandatory disclosure</i></p>	<p><i>Variable size of district and city, type of local government, and wealth consistently affect on the level of compliance with mandatory disclosure. Other variable, namely the level of local dependence on central government may prove inconsistent effect though.</i></p>	<p><i>Research Journal of Finance and Accounting</i> ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.5, No.10, 2014</p>

---

*Government in  
Indonesia*

---

**Arrlinda Junianti Mutaqin (2020): Pengaruh *Wealth, Intergovernmental Revenue* dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat).**

---

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dan penelitian terdahulu penulis mengajukan pembahasan mengenai *wealth, intergovernmental revenue, leverage*, dan kinerja keuangan pemerintah daerah yang kemudian disusun penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Wealth, Intergovernmental Revenue*, dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis melakukan identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini melalui rumusan masalah penelitian yang akan diuraikan berikut ini:

1. Bagaimana *Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage* dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018.
2. Bagaimana pengaruh *Wealth, Intergovernmental Revenue* dan *Leverage* secara parsial dan simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018.



### 1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis:

1. *Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage* dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018.
2. Pengaruh *Wealth, Intergovernmental Revenue* dan *Leverage* secara parsial dan simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018.

### 1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Beberapa hal yang menjadi harapan penulis setelah melakukan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak yang memerlukan, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam menempuh skripsi pada program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi, juga memberikan suatu tambahan pengetahuan mengenai *wealth, intergovernmental revenue* dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang sebenarnya sehingga penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kesesuaian antara teori dan fakta di lapangan.

## 2. Bagi Instansi

Hasil-hasil analisis yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta pengelolaan utang dan modal yang dimiliki sehingga dapat mendorong kemajuan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

## 3. Bagi Pihak Lain

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan khususnya untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018, dengan mengambil dan menganalisis data yang diperoleh secara sekunder melalui media internet dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyajikan data valid mengenai perekonomian Indonesia.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan selama enam bulan yaitu dari bulan Februari 2020 sampai bulan Juli 2020. (Terlampir).